Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta

Yusup Setiawan

STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia

yusufsetiawan165@gmail.com

Informasi artikel

Kata kunci:

Undang-Undang
Pernikahan;
Kartu Keluarga;
Kawin Belum
Tercatat;
Dasar Hukum

ABSTRAK

KK (Kartu Keluarga) merupakan kartu identitas keluarga yang sangat penting serta wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Tujuan Penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk menjawab dua rumusan masalah yakni bagaimana dasar hukum kategori perkawinan belum tercatat sebagai status perkawinan dalam blangko KK dan bagaimana pentingnya pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap perkawinan belum tercatat sebagai status perkawinan pada blangko KK. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana data yang dianalisis berupa paparan kata dan deskripsi keadaan bukan angka. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Berawal dari teori-teori yang membahas tentang pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan beserta data yang berhasil dikumpulkan, kemudian selanjutnya dianalisis dengan analisis yuridis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status atas perkawinan di dalam blangko KK yang semula memiliki status kawin, belum kawin menjadi kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Peraturan ini diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Registrasi, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti dengan adanya pengembangan SIAK 7 (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan versi 7) oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia, dimana salahsatu syarat dalam pendaftaran kependudukan tersebut harus melampirkan buku nikah atau akta perkawinan, dan bagi pernikahan yang belum tercatat dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pernikahan atas dasar pertimbangan yang jelas sesuai dengan telaah kasus permasalahan keluarga di masyarakat, HAM, Hak Warga Negara, Hukum Perdata, Amanat UUD 1945 dan Perundang-undangan.

Keywords:

Marriage Act;
Family Card;
Unregistered Marriage;
Legal Basis

ABSTRACT

Analysis of Marriage Registration (Unregistered Marriage) in Family Card in the Perspective of the Disdukcapil Purwakarta

KK (family card) is a very important family identity card and must be owned by every citizen. The author's purpose in this study is to answer two problem formulations, namely how the legal basis for the marriage category has not been recorded as marital status in the KK form and how the importance of legal fulfillment and protection of marriage has not been recorded as marital status on the KK blank. This research is a research using

---

qualitative methods. Where the data analyzed is in the form of word exposure and description of the situation, not numbers. The data collection techniques used are interviews and documentation. Starting from theories that discuss marriage registration and population administration along with the data that has been collected, then further analyzed by juridical analysis using applicable laws and regulations, which are contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 2 of Government Regulation Number 9 1975 concerning marriage registration, Islamic Law Compilation Book 1 of Marriage Law and Minister of Religion Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2018 concerning Marriage Registration to then draw a conclusion. The results of this study indicate that, changes in the status of marriage in the blank of the family card which originally had marital status, unmarried to registered marriage and unregistered marriage. This regulation is regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 118 of 2017 concerning Blank Family Cards, Registration, and Quotations of Civil Registration Deeds which was followed up with the development of SLAK 7 (Population Administration Information System version 7) by the Directorate General of Population and Civil Registration The Indonesian Ministry of Home Affairs, where one of the requirements in the population registration must attach a marriage book or marriage certificate, and for unregistered marriages can attach a Statement of Absolute Responsibility (SPITM) the truth of marriage on the basis of clear considerations in accordance with the study of cases of family problems in Indonesia. society, human rights, rights of citizens, civil law, the mandate of the 1945 Constitution and legislation.

Copyright © 2022 (Yusup Setiawan). DOI: <https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.02>
Naskah diterima: 15 Juni 2022, direvisi: 27 Juli 2022, disetujui: 30 Juli 2022

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita secara sosial, kemudian terbangun hubungan atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan, dimana hubungan tersebut merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi seorang pria dan wanita guna membina rumah tangga, yang merupakan kondisi terbaik dan kesempatan dalam hal pemenuhan hasrat perkawinan dan tabi'at dasar yang bersifat kemakhlukan yang manusiawi.

Sedangkan, Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakikatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa.21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (Q.S. An-Nisa: 21)

Dari segi administrasi negara itu sendiri, Pemerintah mengatur perkawinan melalui Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana pengertian perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan pada pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun agamanya maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut peraturan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap calon pasangan suami istri.

Pernikahan juga harus dicatatkan sebagai salah satu kepastian hukum. Dimana peraturan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan diatur melalui perundang-undangan bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan ketentuan kepastian hukum, transparansi, serta tertib administrasi di dalam pelaksanaan pernikahan.

Hal ini sesuai dengan UU pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pasal 6 ayat 2, serta pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum (pasal 6 ayat 2). Serta pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.

Dalam realita kehidupan yang ada masih dapat terlihat tingginya suatu pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan *sirri* yang sebenarnya banyak menimbulkan polemik. Hal ini terlihat dari data jumlah pemohon isbat nikah di Pengadilan Agama Purwakarta. Sebagai contoh pernikahan yang tidak dicatat, di-antaranya adalah pernikahan poligami

yang tidak mendapatkan izin dari istri pertama dan pengadilan agama, ataupun karena keterbatasan-keterbatasan tertentu, seperti ketidaktahuan mengenai prosedur yang berlaku serta keterbatasan biaya dalam pengurusan berkas yang harus dipersiapkan menjelang pernikahan.

Adapun dampak yang timbul dari pernikahan yang tidak dicatat berimbas kepada pihak perempuan sebagai istri, beserta anak-anaknya. Walaupun secara agama pernikahan itu sah, akan tetapi dari sudut pandang perlindungan hukum apabila dalam sebuah pernikahan *sirri* terjadi peristiwa hukum dimana istri diperlakukan semena-mena oleh suami maka istri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam melakukan upaya-upaya pembelaan atas dirinya sebagaimana pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dikarenakan lemahnya bukti keabsahan pernikahan secara tertulis.

Begitu pula permasalahan lainnya, seperti kelahiran anak di luar pernikahan tercatat, maka anak-anak tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum sebagai anak sah dari ayahnya. Akibatnya hubungan secara hukum hanya terhubung pada ibu yang melahirkannya saja.

Definisi anak yang sah itu sendiri, sesuai dengan pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”; kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang lahir atau tumbuh sepanjang pernikahan, memperoleh si suami sebagai bapaknya (Soesilo, 2020:88). Sebagaimana tujuan hukum perdata atas penjaminan rasa keamanan dan kenyamanan (Bhentam, 2013). Berdasarkan dua ketentuan tersebut, keabsahan suatu pernikahan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak yang dilahirkan.

Maka dari itu, para ulama fiqh berpendapat, apabila banyak kemudaratan yang timbul karena pernikahan yang tidak dicatat, maka sudah tepat apabila pen-catatan pernikahan ditetapkan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan. Oleh karenanya apabila pernikahan belum tercatat maka dapat dimintakan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh pasangan suami istri melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah atau pengesahan nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dan dalam hal ini akta tersebut berfungsi sebagai alat guna menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara.

Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik (Muchsin, 2008:3). Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. (Rodliyah, 2017)

Akta perkawinan atau buku nikah juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dan salah satu syarat penerbitan KK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Purwakarta. Namun bila perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak dicatatkan, dapat juga dipenuhi hak administrasinya melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti surat atau akta nikah. SPTJM sendiri terbagi menjadi SPTJM kebenaran data kelahiran, dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. SPTJM kebenaran pasangan suami istri merupakan pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, yang menyatakan bahwa mereka benar sebagai pasangan suami istri dengan diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa tersebut berdasarkan waktu, dan tempat. SPTJM mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan PERMENDAGRI nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dimana isinya memperbolehkan akta kelahiran mencantumkan nama kedua orang tua, bahkan bagi anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki surat nikah atau akta perkawinan sebagai wujud pengakuan negara atas identitas yang selanjutnya ini dikenal sebagai SPTJM kebenaran data kelahiran.

Pada tahun 2018 SPTJM juga diatur dalam PERPRES nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil melalui pasal 33 dan pasal 34. Pasal 33 yakni mengenai pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan yang meliputi surat keterangan lahir, buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, KK, dan KTP-el. Sedangkan pasal 34 yakni berbunyi penduduk dapat membuat SPTJM atas kebenaran data yang ditandatangani oleh dua orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran, dan/atau tidak memiliki bukti nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri. KK yang dibuat berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri akan memuat keterangan dengan status “kawin tidak tercatat” dan menghasilkan akta kelahiran dengan kalimat tambahan yang menerangkan status perkawinan orangtua si anak dengan bunyi “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Adapun dasar hukum bagi kategori keterangan perkawinan belum tercatat yaitu, Permendagri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang ditindaklanjuti dengan adanya pengembangan SIAK 7 (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan versi 7) oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Dimana setiap pernikahan/perkawinan saat ini dicatat dalam blangko keterangan KK. Sehingga bilamana ada pasangan suami istri, laki-laki ataupun perempuan yang mengaku sudah menikah namun tidak mencatatkan pernikahan/ perkawinan (*nikah sirri*), tidak dapat menunjukkan akta perkawinan atau buku nikah, maka dalam format baru pada blangko keterangan keluarga akan ditulis dengan status kawin belum tercatat. Sedangkan bagi masyarakat atau keluarga yang sudah memiliki akta perkawinan atau buku nikah, maka status dalam keterangan blangko KK tertulis statusnya kawin tercatat.

B. Teori / Konsep

1. Pencatatan Perkawinan

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Perkawinan merupakan akad perjanjian yang suci dalam menjalankan kehidupan yang sah sebagai pasangan suami istri. Tujuan dalam Islam mengenai perkawinan tidak

hanya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani saja dalam kehidupan manusia, akan tetapi membentuk serta memelihara, meneruskan keturunan, dan menghindari guna mencegah perzinahan, sehingga tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa pelakunya dan masyarakat sekitar. Allah SWT menciptakan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, terutama dalam hal melakukan suatu hubungan perkawinan dimana nalurinya bebas mengikuti insting dan tanpa aturan dimanapun mereka berkehendak (Mardani, 2011:11). Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: *“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rosul mendatangkan suatu ayat (mu’jizat) melainkan dengan izin Allah SWT. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (tertentu).”(Q.S Ar-Ra’d: 38)*

Lingkungan masyarakat di negara kita sendiri secara umum mengenal beberapa istilah pernikahan secara kebiasaan adat serta adapula yang memiliki penilaian masyarakat dengan konotasi dan stigma negatif pernikahan resmi, pernikahan sirri, pernikahan di bawah tangan, pernikahan mut’ah, pernikahan gantung/ kawin gantung, dan pernikahan poligami.

Dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 istilah ikatan lahir batin memiliki arti bahwa dalam suatu perkawinan, memiliki nilai ikatan yang nyata dan formil.

Perkawinan memiliki suatu hubungan erat dengan kerohanian, sehingga bukan hanya unsur jasmani saja melainkan unsur batiniah juga berperan penting dalam kehidupan berumah tangga (Kuzari, 1995:10). Syarat sah suatu perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya, setiap orang yang memeluk agama Islam perkawinannya baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974. Pencatatan itu diperlukan untuk kepastian hukum, pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam draf pencatatan yang disediakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disduk Capil). (Ramulyo, 1996:243)

Pencatatan perkawinan adalah perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (KUA bagi yang beragama Islam) dan kantor catatan sipil bagi yang beragama selain Islam, ditandai dengan penerbitan akta nikah untuk kedua pasangan mem-pelai suami istri. Pencatatan perkawinan sangatlah diperlukan agar apabila dikemudian hari terdapat kasus hukum ataupun terhindar dari kemudharatan seperti poligami karena bukti tertulis ini dapat memproses tindakan hukum bagi setiap persoalan rumah tangga, terutama sebagai salah satu alat bukti sah atau legalitas dalam pengadilan. Pencatatan perkawinan bagi orang Islam bertujuan agar terjaminnya ketertiban bagi perkawinan itu sendiri, oleh karena itu perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan dalam pasal 5, bahwa:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1946 Juncto UU nomor 32 tahun 1954.

Menurut pasal 14 KHI disebutkan bahwa rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah. Rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. adapun prosedur pencatatan perkawinan yang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, dan akad nikah dan pencatatannya.

b. Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan dalam penertiban dan penataan dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayaan hasil informasi data guna pelayanan publik. Dalam sistem administrasi kependudukan, penduduk mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Dokumen kependudukan
- 2) Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pelayanan sipil
- 3) Perlindungan data pribadi
- 4) Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atau keluarganya
- 5) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi dalam pembuatan KK dijelaskan dalam PERPRES RI (Peraturan Presiden Republik Indonesia) nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 11, bahwa penerbitan KK baru untuk penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- 1) Buku nikah (kutipan akta perkawinan) atau kutipan akta perceraian
- 2) Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
- 3) Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil kabupaten/kota bagi WNI yang datang dari wilayah NKRI karena pindah.
- 4) Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi setiap penduduk rentan administrasi kependudukan
- 5) Petikan keputusan presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

KK merupakan dokumen resmi yang harus diperlakukan secara istimewa, oleh karena itu dalam perlakuannya tidak diperbolehkan mencoret, mengubah/ mengganti, menambah dan mengurangi isi data yang tercantum dalam KK tersebut. Setiap perubahan terkait data wajib dilaporkan oleh kepala keluarga ke desa atau kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja. Dijelaskan dalam PERPRES RI nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil pasal 12 Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan yang meliputi KK lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa-peristiwa penting.

PERPRES RI nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 13 menjelaskan bahwa:

- 1) Penerbitan KK dikarenakan hilang atau rusak, bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a) Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
  - b) KTP-el.
- 2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk orang asing harus memenuhi syarat:
  - a) Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
  - b) Kartu ijin tinggal tetap
  - c) KTP-el

Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dimiliki setiap warga negara yang tinggal di Indonesia sebagai tanda pengenal/identitas resmi setelah berusia lebih dari 17 tahun. Program KTP elektronik menggantikan KTP lama sebagai salah-satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan menyesuaikan perkembangan zaman yang berhubungan dengan teknologi informasi yang semakin berkembang. KTP elektronik merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi pada data based kependudukan nasional. Setiap penduduk berhak atas satu KTP yang memuat nomor induk kependudukan (NIK) dan berlaku seumur hidup. (Febriani, 2016:2)

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh yang berhubungan dengan langkah-langkah penelitian dan dilakukan secara sistematis. Metode penelitian membahas terkait prosesnya, yaitu cara kerja untuk memahami prosedur penelitian, dan teknik penelitian. Metode penelitian berkaitan dengan tatacara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian berkaitan dengan urutan kerja dalam penelitian.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan metode penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung (observasi) pada objek penelitian.

b. Penelitian kualitatif

Penelitian kualitatif adalah sebuah rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dikaitkan dengan penyelesaian dan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Peneliti kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi, untuk kemudian dirumuskan menjadi generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat (*common sense*) manusia. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif, yang dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Nawawi, 1998:63)

2. Tempat dan waktu penelitian

Adapun tempat penelitian terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yaitu:

a. Kelurahan Nagrikidul

Kelurahan nagrikidul adalah intansi pemerintahan sekelas desa yang berkaitan pengaturan wilayah administratif yang berlokasi di Jalan Terus-an Kapten Halim G.I Simpang Purwakarta. Dimana tempat pertama melaksanakan Pengabdian Berbasis Penelitian dan menghasilkan temuan blangko KK yang dalam keterangan status perkawinannya adalah kawin belum tercatat.

b. Pengadilan Agama Purwakarta

Pengadilan Agama adalah tempat ke dua peneliti melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), di Pengadilan Agama peneliti juga mendapatkan beberapa informasi sebagai data pembanding bahwa adanya pernikahan tidak tercatat

sebagai referensi melalui jumlah pengajuan isbat nikah di tahun 2020. Pengadilan Agama Purwakarta bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Desa Mekargalih nomor 3 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Jawabarat 14150.

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Disdukcapil dipilih sebagai fokus atau puncak daripada penelitian yang dianggap tepat sebagai lembaga pencatat administrasi kependudukan di kabupaten Purwakarta. Disdukcapil adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekeretaris Daerah. Disdukcapil kabupaten Purwakarta bertempat di Jalan Mr. Dr. Kusuma Atmaja nomor 8, Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat 41114.

Waktu penelitian sesuai dengan proses PBP (Pengabdian Berbasis Penelitian), PKL/PPL (Praktek Kerja Lapangan), Penelitian/Observasi tanggal 11 januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021 dan 27 Mei sampai dengan 27 Agustus 2021

3. Responden

- a) Sekertaris Pengadilan Agama Purwakarta
- b) Sekertaris Disdukcapil Purwakarta
- c) Bidang DAPDUK Disdukcapil Purwakart
- d) Bidang pemanfaatan data dan Inovasi pelayanan Disdukcapil Purwakarta
- e) Bidang Siak Disdukcapil Purwakarta
- f) Bidang pencatatan sipil Disdukcapil Purwakarta

4. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah:

- a. Dasar hukum, prosedur dan gambaran persyaratan pembuatan kartu keluarga bagi perkawinan belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
- b. Data rekapitulasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta terhadap penerbitan blangko kartu keluarga dengan format baru.

5. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua sumber data, yang meliputi:

a. Sumber Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, jadi sumber data tersebut langsung memberikan data pada pengumpul data. Data Primer dalam penelitian ini berasal dari sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dan Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta Sebagai pembanding dalam kesadaran Pencatatan Perkawinan melalui angka isbat nikah, yang meliputi:

- 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta melalui staf kabid dan kasi
- 2) Balangko Keluarga
- 3) Landasan hukum terkait blangko keluarga
- 4) Akta kelahiran yang dinasabkan kepada Ibu
- 5) Sekertaris Pengadilan Agama Purwakarta
- 6) Jumlah data permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Purwakarta

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak berhubungan dan memberikan data secara langsung pada pengumpul data yang digunakan sebagai pendukung data primer. Sumber data sekunder ini dapat berupa referensi atau literatur dari buku maupun penelitian lain yang berkaitan. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Hadits
- 2) UUD 1945
- 3) Buku Kompilasi Hukum Islam / KHI
- 4) UU Perkawinan
- 5) PERMENDAGRI Republik Indonesia nomor 118 tahun 2017, tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- 7) Pencatatan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (karangan Neng Djubaedah)
- 8) Rensra Disdukcapil Kabupaten Purwakarta
- 9) Pencatatan Perkawinan di Indonesia (karangan Ita Musarrofa)
- 10) Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan (karangan Fulthoni)
- 11) Kitab UU Hukum Perdata
- 12) UU Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang peneliti butuhkan adalah data yang akurat, maka dalam pengumpulan data tersebut peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah interaksi melalui komunikasi verbal atau per-cakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan hasil buah pemikiran dan perasaan dengan tepat. Penulis akan melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur agar pembahasan atau jawaban yang dipaparkan narasumber langsung fokus pada pembahasan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa berkas dan naskah yang bersumber atau berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data dokumentasi diperoleh berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian. Metode ini digunakan penulis untuk menelusuri data, baik rekapitulasi penerbitan kartu keluarga dengan format terbaru serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Instrumen Penelitian

Teknik Pengolahan Data, Selanjutnya setelah data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Adalah pengecekan atau pengkoreksian terhadap data yang telah didapatkan dan terkumpul. Dalam suatu kegiatan penelitian, editing perlu dilakukan karena berhubungan dengan kualitas atas hasil yang disuguhkan, ada beberapa kemungkinan data yang didapat dan terkumpul tidak sinkron, sehingga meragukan karena dianggap tidak logis. Tujuan editing adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan, sehingga kekurangan data dapat dilengkapi atau kesalahan dapat diperbaiki baik dengan cara pengumpulan data ulang maupun dengan interpolasi (penyimpanan). Teknik ini akan digunakan penulis untuk memeriksa kembali semua data hasil wawancara yang didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dan Pengadilan Agama Purwakarta sebagai data pembanding.

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh. Dengan teknik ini penulis akan mudah mengatur dan menyusun data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Analizing

Yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian. Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kembali kelengkapan data.

8. Teknik Analisis Data

Langkah yang harus dilakukan selanjutnya, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang bertujuan untuk membuat deskripsi dengan penjabaran atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta terkait format baru blangko.

9. Pengujian Keabsahan Data

Data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yaitu bermula dari hal yang bersifat umum dengan referensi berupa buku-buku maupun peraturan

perundang-undangan yang menjelaskan tentang kartu keluarga, kemudian aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang penulisan perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blanko kartu keluarga sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta

DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) kabupaten Purwakarta merupakan salah satu instansi penyedia layanan publik dalam pembuatan administrasi kependudukan yang beralamat di Jalan Mr. Dr. Kusumahatmaja nomor 8, kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41114. Sebagaimana maklumat pelayanan janji layanan istimewa sebagai visi dan misi 9 tangga cinta Purwakarta Istimewa yang berbunyi ikhlas jujur dan penuh kesungguhan, santun terbuka dan cermat dalam menjalankan tugas, tanggungjawab disiplin dan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, inovatif dan profesional dalam bekerja, memelihara kebersamaan dan kenyamanan lingkungan kerja, etos kerja yang terjaga, wajib memberi informasi secara profesional, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif pada setiap pemohon. Dengan Motto “Bersama Anda Layanan Kami Istimewa”. DISDUKCAPIL kabupaten Purwakarta merupakan lembaga resmi kedinasan, yang memiliki 4 bidang untuk mempermudah kinerja pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi (Sholikhati, 2021):

- 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 3) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Dari penjabaran bidang di atas, DISDUKCAPIL kabupaten Purwakarta memberikan pelayanan pencatatan sipil yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan permasalahan-permasalahan catatan sipil lainnya serta layanan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan KTP, KK, pendatang baru dan masalah kependudukan lainnya.

Di masa pandemi saat ini, terdapat salah satu terobosan terbaru DISDUKCAPIL kabupaten Purwakarta yang sangat inovatif dan memudahkan masyarakat yakni dengan diluncurkannya sebuah aplikasi yang bernama SIPILA *Online* (Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi Adminduk). Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui *website* maupun *android*. Untuk *android* sendiri dapat diunduh melalui *playstore* dengan kata kunci “disdukcapil purwakarta”. Aplikasi ini dikembangkan oleh DISDUKCAPIL untuk mempermudah masyarakat dengan menu yang disederhanakan, sehingga mudah dipahami masyarakat. Selain itu SIPILA *Online* bertujuan untuk mengurangi transmisi covid-19, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik tanpa perlu datang ke DISDUKCAPIL Purwakarta.

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan dengan judul penelitian “Analisa terhadap Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kartu Keluarga dalam Perspektif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Purwakarta”, dan sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengenai dasar hukum pernikahan belum tercatat serta pentingnya pemenuhan dan perlindungan hukum perkawinan belum tercatat, maka di awal peneliti akan menjabarkan perbandingan dokumen Kartu Keluarga format lama dan kartu keluarga dengan format versi baru.

Dalam blangko kartu keluarga format lama memuat nomor, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orangtua. Serta status pernikahan dengan keterangan kawin, belum kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Sedangkan dalam blangko KK dengan format baru terdapat penambahan kolom yang terdiri dari nomor, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen keimigrasian dan nama orang tua. Letak perbedaan dari blangko KK yang lama adalah penambahan kolom tanggal perkawinan serta golongan darah dan juga status perkawinan menjadi kawin tercatat dan kawin belum tercatat.

Dasar hukum format baru blangko KK, tercatat dalam PERMENDAGRI nomor 118 tahun 2017, sedangkan Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil disebutkan dalam Bab II PERMENDAGRI pasal 3 ayat 1 sampai 5 yaitu (Meirizza, 2021):

- a. Blangko KK meliputi spesifikasi blangko dan formulasi kalimat.
- b. Spesifikasi blangko sebagaimana dimaksud pada ayat:
  - 1) Bahan baku
  - 2) Desain
  - 3) Ukuran
  - 4) Warna
- c. Formulasi kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat:
  - 1) Keterangan mengenai kolom isian dan atau
  - 2) Uraian kata
- d. Keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf A yang memuat:
  - 1) Nomor KK
  - 2) Nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga
  - 3) NIK
  - 4) Jenis kelamin
  - 5) Alamat
  - 6) Tempat lahir
  - 7) Tanggal lahir
  - 8) Agama
  - 9) Pendidikan
  - 10) Pekerjaan
  - 11) Status perkawinan
  - 12) Status hubungan dalam keluarga
  - 13) Kewarganegaraan
  - 14) Dokumen imigrasi
  - 15) Nama orang tua
- e. Selain keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat kolom:

- 1) Tempat dan tanggal penandatanganan, dan
- 2) Nomenklatur, nama, NIP, dan tanda tangan kepala DISDUKCAPIL kota/kabupaten
- 3) Nama dan tanda tangan kepala keluarga, dan
- 4) Keterangan 4 (empat) lembar rangkap untuk :
  - a) Kepala keluarga
  - b) RT (Rukun Tetangga) atau nama lainnya
  - c) Desa/kelurahan atau nama lainnya
  - d) Kecamatan atau nama lainnya

Mengenai penulisan KK, dijelaskan dalam PERMENDAGRI nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KK, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 33 yakni bahwa penulisan register dan kutipan akta pencatatan sipil harus menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan. Dan instansi pelaksana dituntut untuk melaksanakan sosialisasi terkait pemberlakuan SIAK 7 dimana di dalamnya telah menggunakan penambahan kolom golongan darah, tanggal pernikahan, serta perubahan status perkawinan yang pada sebelumnya kawin, atau belum kawin, menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat, dan belum kawin agar dilakukan pengecekan ulang terkait berkas persyaratan yang dibawa setiap masyarakat dalam permohonan pembuatan KK. (Meirizza, 2021)

E. Penutup

Dampak positif bagi pemerintah atas pengembangan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) versi 7 di Indonesia dalam mengetahui dan memperoleh data kependudukan secara lengkap dan akurat sehingga hak masyarakat yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dapat terpenuhi secara menyeluruh. Namun terdapat celah yang menimbulkan sisi negatif dari pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi penduduk yang tidak mencatatkan perkawinannya sehingga dapat dijadikan sebuah alasan bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan sah hanya secara agama dan kepercayaan saja.

Perlindungan hukum akan didapatkan melalui dokumen resmi negara berupa KK yang dikeluarkan pemerintah sebagai dasar atau landasan hukum bagi perkawinan belum tercatat, sehingga asumsi atau persepsi yang timbul di masyarakat yang memandang pencatatan pernikahan hanya sebagai formalitas persyaratan administratif yang tidak lagi memiliki legalitas formal di mata hukum akhirnya dapat terjawab atas kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

1. Simpulan

Dasar hukum dijadikannya kategori pernikahan belum tercatat sebagai salah satu status pernikahan dalam blangko KK dijelaskan dalam PERMENDAGRI nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko KK, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Dan yang berhubungan dengan sistem penulisan diatur dalam pasal 33 yang berbunyi bahwa penulisan register dan kutipan akta pencatatan sipil harus menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) paling lama satu tahun setelah PERMEN (peraturan menteri) ini diundangkan.

Pengembangan SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) versi 7 ini mencantumkan perubahan status pernikahan yang semula kawin, dan belum kawin, sekarang menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat, dan belum kawin.

Secara tidak langsung, pengembangan data base kependudukan yang beralih menjadi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK7) menjadi solusi atas kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi pasangan suami istri dengan status kawin belum tercatat, walaupun menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula bertujuan dan memiliki fungsi sebagai penjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, akhirnya menjadi asumsi yang seolah bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan yang di atur dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 PP (Peraturan Pemerintah) Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam pasal 5 yang berbunyi bahwa pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat ketertiban bagi umat Islam. Akan tetapi landasan hukum yang memperkuat legalitas sebuah perkawinan melalui pemenuhan hak administrasi kependudukan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya

PERMENDAGRI nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang disebutkan dalam pasal 2 yang akhirnya menjadi jawaban terhadap asumsi tidak tertib hukum tersebut, karena di dalam penulisan status kawin belum tercatat di dalam blangko KK.

2. Saran

DISDUKCAPIL kabupaten Purwakarta beserta dinas terkait lainnya memufakati atas kebijakan pemenuhan hak warga negara didalam pemenuhan hak administrasi kependudukan, dan hendaknya lebih cermat dalam pemeriksaan berkas sebagai tuntutan tugas, dimana setiap lapisan elemen masyarakat yang mengajukan permohonan penerbitan KK hendaknya diperiksa secara teliti apabila terdapat kekurangan terkait persyaratan sehingga tidak dapat menunjukan serta melampirkan berkas berupa surat nikah atau akta perkawinan. Petugas pelayanan instansi pelaksana administrasi sebaiknya menanyakan apa yang menjadi alasan warga masyarakat tersebut sehingga tidak dapat melampirkan persyaratan berupa surat pernikahan atau akta perkawinannya dan berupaya untuk mengarahkan dengan memberikan saran agar mencatatkan pernikahannya dengan pengajuan isbat nikah melalui pengadilan agama kemudian mengurus ulang pembuatan surat nikah atau akta perkawinan apabila kehilangan, guna menghindari pemberian keterangan kawin belum tercatat pada blangko KK. Begitupun pemerintah daerah dan dinas terkait lainnya agar dapat berupaya maksimal di dalam pemenuhan atas hak warga negara dengan cara mengarahkan, mendampingi, dan memfasilitasi dengan cara dikerjasamakan dengan instansi terkait lainnya. seperti yang di lakukan oleh DISDUKCAPIL kabupaten Purwakarta melalui PERMENDAGRI berupaya memberikan solusi atas polemik yang terjadi di masyarakat terkait pemenuhan hak atas administrasi kependudukan.

Disamping pemenuhan hak administrasi sebagai wujud pemenuhan hak atas warga negara oleh pemerintah, yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga negaranya yang disahkan melalui perundang-undangan, pengoptimalan sosialisasi kepada seluruh element lapisan masyarakat terkait pembaharuan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK7) juga sangat penting oleh instansi pemerintah yang bertugas sebagai pengelola informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan pelaksana, atas perubahan penulisan status per-

kawinan menjadi kawin tercatat, dan kawin belum tercatat. Dan menepis asumsi publik yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai formalitas keperluan administratif saja, sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa itu adalah bagian dari kewajiban yang memiliki dampak hukum, terutama dalam pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan, sebagai keluarga, dan keberadaan anak yang dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar M. Sekertaris Pengadilan Agama Purwakarta. Wawancara tentang Jumlah Pengaju Isbat Nikah 2020(Purwakarta: Senin, 22 Februari 2021. 10.00 WIB)
- Alam, Mochammad Doddy Syahirul. (2013). *Pelaksanaan Sisten Informasi Administrasi Kependudukan (SLAK) Guna Menwujudkan Tertib Administrasi Kependudukan*. Jurnal ilmu sosial, politik dan pemerintahan diakses pada 27 Juli 2021 pukul 19.45
- Ali. Achmad & Wiwie Heryani. (2012) *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Aman, Raja Ilyas, et al., (2012). Perbandingan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 3, no. 1 (Hal.20).
- Asep Sopandi, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, *Wawancara tentang Pelaksanaan SLAK7* (Purwakarta: Senin, 7 Juni 2021. 11.30 WIB)
- Bhentam, Jeremi. (2013) *Teori Perundang-undangan. Prinsip-prinsip legalitas, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*. Bandung : Nuansa Cendikia dan Nusa media.
- Buku Biru, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia* (Jogjakarta:2013).Hal.92
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. (2004). [Http://ejournal.radenintan.ac.id](http://ejournal.radenintan.ac.id). “Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah” diakses pada 25 Juli 2021 pukul 13.30
- Departemen Agama Republik Indonesia, (2000). *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.UD. Mekar Surabaya.
- Disdukcapil.purwakartakab.go.id,Tim Sosial Media Disdukcapil Purwakarta
- Djuaaeidah, Neng. (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djubaedah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta : Sinar Grafika
- Fatia, Azhariah. (2011). “Hak dan Perlindungan Anak dalam Prespektif Hadits” [Http://moraref.kemenag.go.id](http://moraref.kemenag.go.id). Diakses pada 2 Agustus 2021 pukul 14.38
- Febriani, Mahmuda Panca, (2016). Pelaksanaan Program e-KTP dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan.*Jurnal Ilmiah*, vol.5, No.2.
- Febriani, Mahmuda Pancawisma, (2016). [Http://Untagsmg.ac.id](http://Untagsmg.ac.id). “Pelaksanaan Program e KTP dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan”. *Jurnal Ilmiah*, vol. No. 2 (Hal 2).

Fitri Sholikhati, Sekertaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, *wawancara 4 (Empat) Bidang Pelayanan DISDUKCAPIL*. (Purwakarta: Selasa, 01 Juni 2021. 10.00 WIB)

Hasibuan, Toni Akbar & Yusril Ihza Mahendra. (2013). *Gubuk Keadilan Bantuan Hukum & Pemenuhan Kebutuhan Acces to Justice*. Yogyakarta : Kuda Hitam Publishing

Hulasoh, Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Status Kewarganegaraan & Mirra Meirizza, S.STP., M.SI. Kepala Seksi Identitas Penduduk , Disdukcapil Kabupaten Purwakarta, *wawancara tentang Prosedural Penerbitan Kartu Keluarga*(Purwakarta, Senin, 5 Juli 2021. 10.00 WIB)

Husna, A. I. N., & Paramansyah, A. (2020). Perkembangan Industri Perbankan Syariah pada Pembiayaan yang Disalurkan (Libraryresearch). *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(2), 129-139.

Konsiderans Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Kuzari, Achmad. (1995). "Nikah sebagai Perikatan". [Http://Opac.Perpusnas.go.id](http://Opac.Perpusnas.go.id). Diakses pada 20 Juli 2021 pukul 09.45.

Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mirra Meirizza, Kepala Seksi Identitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, *Wawancara tentang Dasar Hukum* (Purwakata : Kamis, 10 Juni 202. 09.15 WIB).

Mirra Meirizza, Kepala Seksi Identitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, *Wawancara tentang Upaya Pengsosialisasian dan Verivikasi Berkas Persyaratan* (Purwakata : Senin, 15 Juni 2021. 09.30 WIB).

Muchsin. (2008). *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Materi Rakernas Perdata Agama, Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Musarofa, Ita. (2014). <https://scholar.google.com/citations> "Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Proses dan Prosedurnya". Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII. Diakses pada 3 Agustus 2021 16.35 .

Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2022). Artikel Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Cempaka Purwakarta: Kesejahteraan. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 3(1), 1-14.

Paramansyah, H. A., SE, M., Husna, A. I. N., & Sos, S. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam*. Almuqsih Pustaka.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Hal. 8.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PERPRES RI (Peraturan Presiden Republik Indonesia) Nomor 96 Tahun 2018 *tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 79 ayat 1*.

Putusan Nomor. 46/UUP-VIII/2010, 17 Februari 2012. *Dinamika Penegakan Hukum Konstitusioal Warga Negara, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012. Hubungan Keperdataan Anak di Luar Perkawinan Adalah dengan Kedua Orangtua dan Keluarganya*. (Jakarta:2012)

Ramulyo, Mohd. Idris. (1996). [Http//lib.ui.ac.id](http://lib.ui.ac.id). “*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*” diakses pada 28 Juli 2021 pukul 12.37

Rodliyah, Nunung. (2017). *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal pernikahan. Bandarlampung

Rukmana, C. H., Mansyur, M. H., & Kosim, A. (2021). Problematika dalam Menghadapi Pembelajaran Work From Home pada Masa Pandemi Covid-19. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 593-598.

Sadono, Dwi. (2007) “Sensus Daerah mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan dalam Rangka Otonomi Daerah”, *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, vol.1, no.3 (hal 8).

Saripudin, A., Oktriawan, W., & Kurniasih, N. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Restoran Saung Manglid. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 48-57.

Soesilo. (2020) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pustaka Buana.

Solihin, W., Fauziah, N., & Mukti, S. (2021). Peran Agama dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(2), 143-154.

Syafa'at, Abdul Kholiq. (2014). “Hukum Keluarga Islam”. [Http://Scholar.googleco.id](http://Scholar.googleco.id), diakses pada 1 Agustus 2021 pukul 10.30

Tabroni, I., & Purnamasari, R. (2022). Kajian Yasinan Mingguan dalam Membina Karakter Masyarakat Pada Masa Covid-19 di Perumahan Lebak Kinasih Purwakarta. *Sivitas: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 9-18.

Tarsi. (2009). *Problematika Nikah di Bawah Tangan Kaitannya dengan Pengesahan Nikah*. Banjar Masin: P.A. Semarang

Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Edisi 2011. Fokus Media.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia (2013). Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Buku Biru, vol.1, No.92.

Undang-Undang Republik Indonesia (2014). Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Graha Media Press.

Yeny Yulistriana, Kepala Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, *Wawancara tentang Daftar Jumlah Pemegang Kartu Keluarga Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020*, (Purwakarta : Kamis, 10 Juni 2021. 10.30 WIB).